



Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025–2029

Juni 2025

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

0%
POVERTY

8%
GROWTH

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP Tahun 2025-2029 (2/2)

Goals	Arah Kebijakan	Objectives	Control and Check Point	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
 Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan	Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	101,76	105-108	106-108	107-108	108-109	109-110
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	102,07	103,25	103,50	103,75	104,00	104,25
			Nilai Tukar Petambak Garam	129,62	130	130,25	130,50	130,75	131
		Meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya KP	Peningkatan Indeks Kepatuhan Sektor KP	Indikator baru	76,00	77,7	80,2	81,7	83,8
		Meningkatkan sumber daya manusia KP yang kompeten	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP Kompeten yang terserap di DUDIKA	Indikator baru	75	76	77	78	79
 Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK Pembersihan Sampah Plastik di Laut	Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Peningkatan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0-1)	0,40	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
		Memperkuat penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang laut dan zonasi wilayah pesisir secara partisipatif dan berbasis ekosistem	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	Indikator baru	13,60	34,69	55,78	77,55	100
		Mengurangi jumlah sampah yang masuk kelaut	Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut (%)	Indikator baru	1	40	50	60	70
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan, pemberantasan korupsi	Memastikan birokrasi yang efektif dan efisien melalui digitalisasi yang berorientasi pada pelayanan publik prima	Indeks Reformasi Birokrasi	91,70	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25

04

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



SASARAN STRATEGIS

PROSES BISNIS

ISU DAN STRATEGI

- Isu Strategis Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

Strategi Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

- Isu Strategis Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Strategi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Isu Strategis Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan

Strategi Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan

- Isu Strategis Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan

Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan

KEBUTUHAN ANGGARAN

ACTIVITY PLAN

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP Tahun 2025-2029 (1/2)

Ultimate Goals	Arah Kebijakan	Objectives	Control and Check Point	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
 Melindungi Laut dan Sumber Dayanya	Memperluas Kawasan Konservasi Laut	Meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya KP	Peningkatan Indeks Kepatuhan Sektor KP	Indikator baru	76,00	77,7	80,2	81,7	83,8
 Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan yang Tidak Ramah Lingkungan	Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan								
 Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan PPK Pembersihan Sampah Plastik di Laut								

Untuk memastikan pencapaian control point utama, diperlukan strategi yang komprehensif untuk *end-to-end value chain* serta keterlibatan aktif dari seluruh direktorat

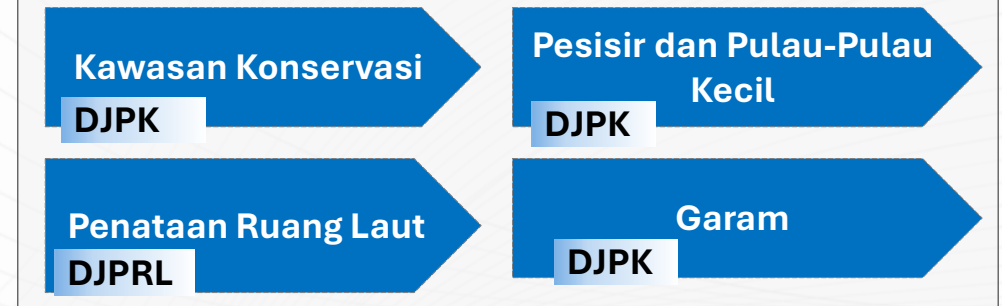
Control and Check Point: Pengawasan SDKP

1 Peningkatan Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan

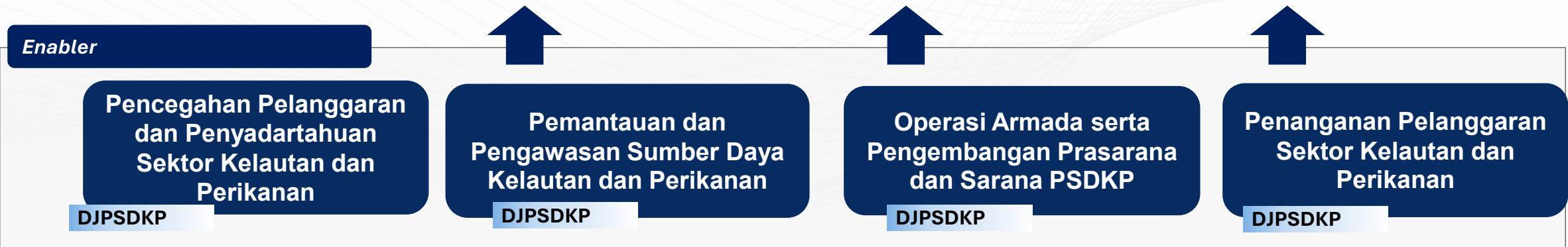
Supply Chain Produk Perikanan



Supply Chain Sektor Kelautan



Enabler





Isu Strategis Enablers

Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan

Enablers

Objectives

Tantangan Utama

**Pencegahan
Pelanggaran
dan
Penyadartahua
n sektor
Kelautan dan
Perikanan**

**Meningkatkan
kesadartahuan dan
partisipasi
masyarakat kelautan
dan perikanan dalam
mendukung
pengawasan SDKP**

1. Tingginya resistensi masyarakat terhadap upaya perbaikan tata kelola kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
2. Rendahnya kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung perbaikan tata kelola kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
3. Kurang optimalnya kampanye dan komunikasi publik terhadap upaya pelibatan masyarakat untuk mendukung tata kelola kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan

Strategi Enablers : Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan melalui pembinaan Pokmaswas dan Penyadartahuan

Enablers	Objectives	Strategic Initiatives	Control Check Point	Satuan	Target		Anggaran (Rp Milyar)		
					2025	2029	APBN	PHLN	Other
Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam mendukung pengawasan SDKP	1. Sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan 2. Pembinaan Pokmaswas secara efektif 3. Pemberitaan capaian pengawasan kelautan dan perikanan kepada masyarakat secara masif <i>Control point utama yang terdampak:</i>	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks	80	84	7,34	-	-
			Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dan pemanfaatan SDKP	Orang	272	2.972	7,34	-	-
			Jumlah Pokmaswas yang aktif dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kelompok	960	1.218	92,98	-	-
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina	Kelompok	1.200	1.450	92,98	-	-
			Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai	1	3	3,81	-	-
			Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	1	5	3,81	-	-

1 Peningkatan indeks kepatuhan sektor KP



Isu Strategis Enablers

Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Enablers

Objectives

Tantangan Utama

**Pemantauan
dan
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan**

**Meningkatkan
kepatuhan pelaku
usaha kelautan dan
perikanan**

1. Luasnya cakupan wilayah pengawasan SDKP dan karakteristik wilayah kepulauan yang berbeda-beda
2. Masih banyaknya pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan
3. Masih banyaknya penyalahgunaan dokumen perijinan dan *mark down* ukuran kapal
4. Masih maraknya pelanggaran kegiatan distribusi, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
5. Jumlah Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terus bertambah setiap tahun



Strategi Enablers : Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan

Enablers	Objectives	Strategic Initiatives	Control Check Point	Satuan	Target		Anggaran (Rp Milyar)		
					2025	2029	APBN	PHLN	Other
Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Operasi intelijen kelautan dan perikanan 2. Operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3. Pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi <i>Control point utama yang terdampak:</i> 1	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Indeks	82	86	512,11	-	-
			Pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor kelautan	Izin Usaha	2.498	3.498	241,75	-	-
			Pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Izin Usaha	16.979	27.277	186,95	-	-
			Operasional Pusat Pengendalian (Pusdal) PSDKP	Bulan	12	12	83,4	-	-



Isu Strategis Enablers

Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

Enablers

Objectives

Tantangan Utama

**Operasi Armada
serta
Pengembangan
Prasarana dan
Sarana PSDKP**

**Meningkatkan
ketangguhan pengawasan
sumber daya kelautan
dan perikanan**

1. Masih maraknya *Illegal fishing* yang diikuti kejahatan lain (perbudakan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, perdagangan senjata), transshipment illegal, rumpon ilegal, alat tangkap yang dilarang sehingga menimbulkan kerugian negara secara ekonomi, sosial, lingkungan dan kedaulatan
2. Belum selesainya batas maritim dengan beberapa negara (selat Malaka dan Laut Natuna Utara) yang berpotensi menimbulkan klaim sepihak dalam pemanfaatan sumber daya ikan
3. Semakin kompleksnya modus operandi penangkapan ikan diwilayah perbatasan
4. Masih adanya pelanggaran dikawasan konservasi
5. Masih adanya *destructive fishing* dan pencemaran laut
6. Masih tingginya pemanfaatan ruang laut yang illegal dan merusak lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan,
7. Terbatasnya kapasitas sarana dan prasarana pengawasan.



Strategi Enablers : Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP melalui operasi armada, perawatan armada PSDKP dan pembangunan sarpras

Enablers	Objectives	Strategic Initiatives	Control Check Point	Satuan	Target		Anggaran (Rp Milyar)		
					2025	2029	APBN	PHLN	Other
Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Meningkatkan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1. Pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2. Pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan <i>Control point utama yang terdampak:</i> 1	Indeks Operasi Armada Pengawasan SDKP	Indeks	92	96	6.402,4	-	-
			Operasi Kapal Pengawas	Hari operasi	28	150	5.963,1	-	-
			Operasi Pesawat Patroli	Hari operasi	140	250	325	-	-
			Operasi Speedboat Pengawas	Hari operasi	20	100	114,3	-	-
			Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80	90	939,5	5.828,9	-
			Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	Unit	10	0	-	5.828,9	-
			Speedboat pengawas	Unit	-	25	59,7	-	-
			Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	Unit	-	52	316,3	-	-
			Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	Unit	122	141	563,4	-	-



Isu Strategis Enablers

Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan

Enablers	Objectives	Tantangan Utama
Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	1. Semakin kompleksnya modus operandi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan 2. Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan belum terintegrasi dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung (secara online/aplikasi) 3. Perlu adanya kesepahaman antar penegak hukum bidang kelautan dan perikanan terkait UU Cipta Kerja



Strategi Enablers : Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan melalui penanganan pelanggaran TPKP

Enablers	Objectives	Strategic Initiatives	Control Check Point	Satuan	Target		Anggaran (Rp Milyar)		
					2025	2029	APBN	PHLN	Other
Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	1. Penanganan pelanggaran administrasi bidang kelautan dan perikanan 2. Penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 1 Control point utama yang terdampak:	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Indeks	80	84	151,29	-	-
			Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	Perkara	2	10	6,23	-	-
			Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	Perkara	150	100	54,76	-	-
			Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	Perkara	20	50	47,13	-	-
			Penyelesaian Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP	Perkara	4	10	43,16	-	-

1 Peningkatan indeks kepatuhan sektor KP

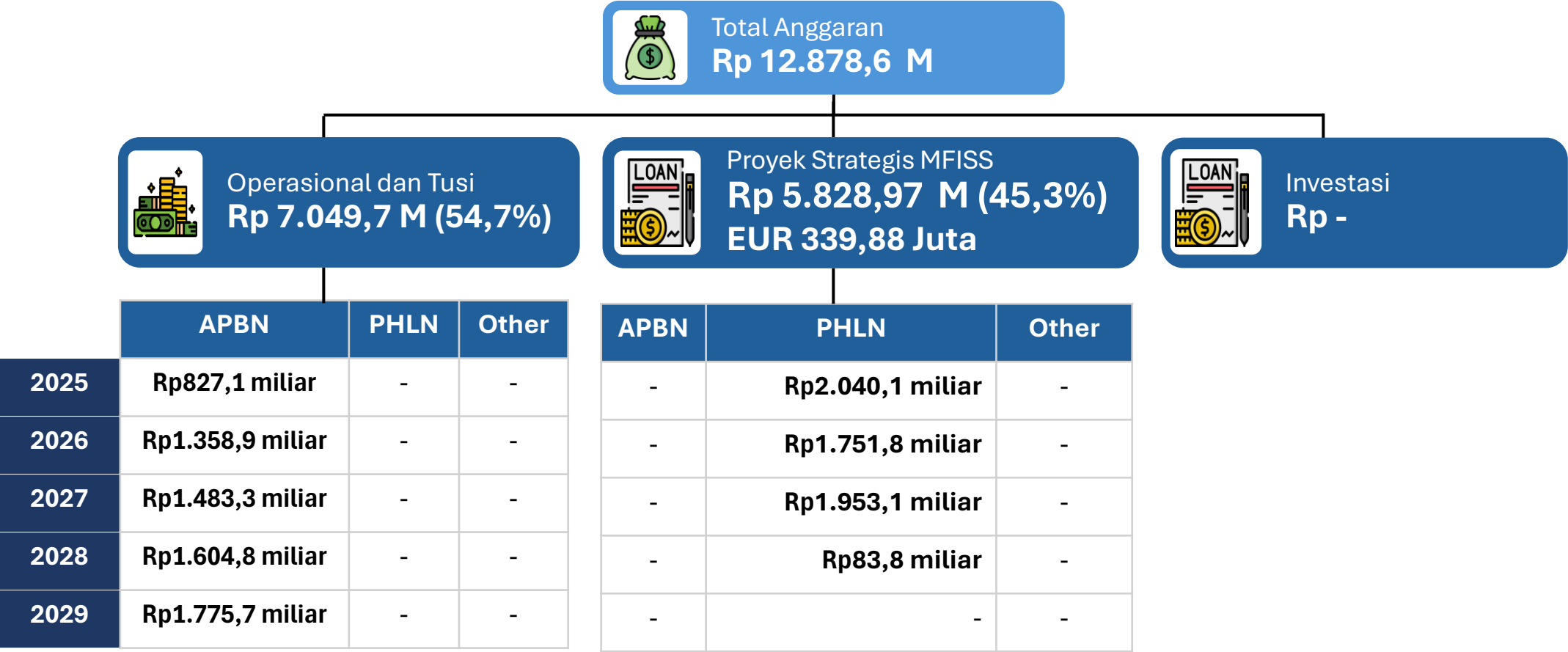
Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025-2029

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Rincian Program	Sumber Pendanaan	Tahun					Total 2025-2029
		2025 (berjalan)	2026 (usulan)	2027 (indikatif)	2028 (indikatif)	2029 (indikatif)	
Proyek Strategis		Rp2.040,1 miliar	Rp1.751,9miliar	Rp1.953,1 miliar	Rp83,9 miliar	-	Rp5.828,9 miliar
Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	PHLN (Pemerintah Spanyol-BBVA/ICO)	Rp2.040,1 miliar	Rp1.751,9 miliar	Rp1.953,1 miliar	Rp83,9 miliar	-	Rp5.828,9 miliar
Modelling		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Pemerintah		Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp27,5 miliar
Pembinaan Pokmaswas (Aspirasi)	APBN	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp5,5 miliar	Rp27,5 miliar
Mandatory		Rp445,6 miliar	Rp893,2 miliar	Rp966,3 miliar	Rp1.032,2 miliar	Rp1.125,4 miliar	Rp4.462,7 miliar
Operasi Kapal Pengawas	APBN	Rp310,5 miliar	Rp675 miliar	Rp720 miliar	Rp750 miliar	Rp789 miliar	Rp3.244,5 miliar
Operasi Pesawat Patroli	APBN	Rp 40 miliar	Rp42 miliar	Rp45 miliar	Rp52 miliar	Rp67 miliar	Rp246 miliar
Operasi Speedboat Pengawas	APBN	Rp9,8 miliar	Rp25 miliar	Rp25.5 miliar	Rp26.5 miliar	Rp34 miliar	Rp120,8 miliar
Operasional Pusdal PSDKP	APBN	Rp. 3,8 miliar	Rp4 miliar	Rp. 4,1 miliar	Rp. 4,2 miliar	Rp4,3 miliar	Rp20,4 miliar
Perawatan Armada PSDKP	APBN	Rp. 58,8 miliar	Rp. 100 miliar	Rp. 105 miliar	Rp. 110 miliar	Rp115 miliar	Rp488,8 miliar
Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha KP	APBN	Rp17,1 miliar	Rp28,5 miliar	Rp35 miliar	Rp42 miliar	Rp53,1 miliar	Rp175,8 miliar
Penanganan Kasus Sektor Kelautan dan Perikanan	APBN	Rp. 5,4 miliar	Rp18,7 miliar	Rp31,7 miliar	Rp47,5 miliar	Rp63 miliar	Rp166,3 miliar
Dukungan Tugas dan Fungsi	APBN	Rp96,0 miliar	Rp166,2 miliar	Rp202,8miliar	Rp242,9 miliar	Rp304,5 miliar	Rp. 1.012,4 miliar
Belanja Operasional	APBN	Rp280,0 miliar	Rp294,0 miliar	Rp308,7 miliar	Rp324,1 miliar	Rp340,4 miliar	Rp. 1.547,2 miliar
Total Anggaran		Rp2.867,2 miliar	Rp3.110,8milyar	Rp3.436,4 miliar	Rp1.688,6 miliar	Rp1.775,8 miliar	Rp12.878,6 miliar

Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025-2029
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Activity Plan

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

PENANGGUNG JAWAB :		Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan		LOKASI :		SPANYOL, BATAM, JAKARTA, UPT PSDKP																
TUJUAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN		KEBUTUHAN INVESTASI		DAMPAK																
Meningkatkan kapasitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penyediaan sistem pengawasan yang terintegrasi.		<table><tr><td>2025:</td><td>2.040.141.765.026</td><td>(35%)</td></tr><tr><td>2026:</td><td>1.751.891.934.000</td><td>(30,1%)</td></tr><tr><td>2027:</td><td>1.953.077.588.476</td><td>(33,5%)</td></tr><tr><td>2028:</td><td>83.865.184.000</td><td>(1,4%)</td></tr><tr><td colspan="3">* Jika penarikan PHLN 2025 disetujui</td></tr></table>		2025:	2.040.141.765.026	(35%)	2026:	1.751.891.934.000	(30,1%)	2027:	1.953.077.588.476	(33,5%)	2028:	83.865.184.000	(1,4%)	* Jika penarikan PHLN 2025 disetujui			 EUR 339,88 Juta Rp 5,8 Triliun Pembangunan 10 Kapal Pengawas EUR 254,7 Juta Sarana surveillance EUR 41,6 Juta Pembangunan prasarana dan sistem komunikasi maritim EUR 43,5 Juta		Langsung  Mengakselerasi peningkatan pengawasan di WPPNRI  <i>Integrated surveillance system</i> dengan sistem komunikasi maritim dan signal intelijen  Peningkatan PNBP bidang kelautan dan perikanan Tidak Langsung  Nelayan semakin aman dan nyaman dalam menangkap ikan  Sumber daya perikanan yang berkelanjutan  Vol produksi 55.414 ton/tahun Nilai produksi Rp.2,2 T/tahun	
2025:	2.040.141.765.026	(35%)																				
2026:	1.751.891.934.000	(30,1%)																				
2027:	1.953.077.588.476	(33,5%)																				
2028:	83.865.184.000	(1,4%)																				
* Jika penarikan PHLN 2025 disetujui																						
TIMELINE KEGIATAN																						
2025		2026		2027		2028																
• Loan Efektif • Perencanaan awal • Adendum Kontrak • Pembayaran Uang Muka • Pembangunan 10 unit Kapal pengawas (Cutting Steel, Keel Laying)		• Lanjutan Pembangunan 10 unit Kapal pengawas • Pembangunan Dermaga di Batam, Cilacap • Pengadaan Drone dan hanggar • Pembangunan RMC		• Serah terima 3 unit kapal luar negeri dan 4 kapal dalam negeri • Sistem komunikasi maritim terintegrasi		• Serah terima 1 unit kapal luar negeri dan 2 kapal dalam negeri																
INDIKATOR INVESTASI																						
 Pemberi Pinjaman				Pemerintah Spanyol																		
 Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman				10 Tahun																		
 Payback Period				7 tahun																		

Activity Plan

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

PENANGGUNG
JAWAB :

Direktur Prasarana dan Sarana
Pengawasan

LOKASI :

SPANYOL, BATAM, JAKARTA, UPT PSDKP

TIMELINE KEGIATAN																	
		2025				2026				2027				2028			
Kegiatan	Concheck	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Persetujuan MKP tentang Proyek MFISS dan Pembentukan Satgas	KepMenKP tentang Tim Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan MFISS																
Adendum Kontrak	Dokumen Adendum Kontrak Proyek MFISS																
Addendum Loan Agreement	Dokumen Addendum Loan Agreement																
Penyesuaian RSPP anggaran PHLN	Dokumen persetujuan penarikan anggaran PHLN, Dokumen RKAKL																
Pencairan Anggaran PHLN	Surat perintah pencairan dana dari KPPN																
Reviu owner requirement	Dokumen Reviu owner requirement																
Cutting steel pembangunan kapal pengawas	Berita Acara																
Pelaksanaan Pembangunan Kapal Pengawas 70 M (4 unit), 60 M (6 Unit)	Kapal Terbangun																
Penyerahan Kapal	BAST																
Pembangunan RMC dan Dermaga	Laporan identifikasi																